

Implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada PT Unilever Indonesia Tbk

Widiya Indah Lestari¹, Elvina Zailanty Harahap², Arif Hidayat Lubis³, Ahmad Wahyudi Zein⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: widyaindahlestari02@icloud.com¹, hrpelvina@gmail.com², arifhidayatlubis750@gmail.com³, ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id⁴

Abstrak

Good Corporate Governance (GCG) merupakan fondasi penting dalam pengelolaan perusahaan terbuka untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan kepentingan pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip GCG pada PT Unilever Indonesia Tbk berdasarkan lima dimensi, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui pemanfaatan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dokumen tata kelola perusahaan, serta literatur relevan periode 2020–2024. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengaitkan praktik perusahaan terhadap kerangka teoretis GCG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG di PT Unilever Indonesia Tbk telah berjalan relatif konsisten dan terintegrasi, khususnya pada aspek keterbukaan informasi, kejelasan struktur dan fungsi organ perusahaan, sistem pengendalian internal, serta mekanisme akuntabilitas kinerja manajemen. Penerapan ini berkontribusi positif terhadap kualitas pelaporan keuangan, kepercayaan investor, dan keberlanjutan kinerja perusahaan. Namun, penguatan prinsip independensi dan kewajaran masih perlu ditingkatkan untuk meminimalkan potensi konflik kepentingan. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian tata kelola perusahaan serta referensi praktis bagi perusahaan publik dalam memperkuat implementasi GCG berkelanjutan.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Perusahaan Terbuka, Transparansi, Akuntabilitas, PT Unilever Indonesia Tbk.

PENDAHULUAN

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) merupakan fondasi penting dalam manajemen perusahaan modern, terutama untuk perusahaan publik yang perlu mengatur hubungan antara pemilik saham, pengelola, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya secara adil. (Klaudia et al., 2022). GCG diposisikan sebagai seperangkat mekanisme yang berfungsi untuk mengarahkan sekaligus mengawasi aktivitas perusahaan agar distribusi kewenangan dan tanggung jawab berjalan proporsional, sehingga keberlanjutan operasional perusahaan dapat terjaga dalam jangka panjang (P. P. Sari & Pratiwi, 2022). Dalam kerangka ini, penerapan GCG dipandang efektif sebagai instrumen untuk menekan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen serta memperbaiki kualitas keputusan strategis yang diambil oleh manajemen.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa tata kelola yang diterapkan secara optimal memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi perusahaan. Sistem pengawasan yang kuat mampu menurunkan biaya keagenan yang muncul akibat pemisahan kepemilikan dan pengelolaan, sekaligus menekan biaya pendanaan melalui peningkatan tingkat kepercayaan investor dan kreditur. Selain itu, praktik GCG mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih terstruktur, efisien, dan berorientasi pada pencapaian nilai jangka panjang, serta berperan sebagai instrumen pengendalian terhadap potensi penyimpangan kewenangan oleh pihak manajemen (Harahap, 2024).

Di tingkat nasional, penguatan implementasi GCG didukung oleh keberadaan regulasi dan pedoman resmi, salah satunya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik

Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 yang mendefinisikan lima prinsip dasar pengelolaan, yaitu keterbukaan, tanggung jawab, akuntabilitas, mandiri, dan keadilan. Prinsip keterbukaan menyoroti kebutuhan bagi perusahaan untuk menjelaskan secara jelas kepada publik. menyampaikan informasi yang material, andal, dan tepat waktu kepada seluruh pihak terkait (Rahmadanti & Fathah, 2025). Akuntabilitas berkaitan dengan kejelasan peran, fungsi, serta mekanisme pertanggungjawaban masing-masing organ perusahaan agar pengelolaan dapat berlangsung secara efektif. Prinsip pertanggungjawaban menuntut kepatuhan terhadap ketentuan hukum serta pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya, kemandirian mengharuskan proses pengelolaan perusahaan berlangsung tanpa intervensi dan benturan kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas keputusan. Sementara itu, kewajaran menuntut adanya perlakuan setara bagi Semua pemilik saham dan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan hak serta kewajibannya. (Yusuf et al., 2023).

Sebagai perusahaan yang terdaftar di pasar saham Indonesia dan bagian dari jaringan Unilever Group internasional, PT Unilever Indonesia Tbk menghadapi tingkat kompleksitas tata kelola yang relatif tinggi (Ilyasa & Nurkholis, 2023). Skala operasi yang besar, struktur kepemilikan publik, serta kewajiban mengikuti standar tata kelola global menuntut perusahaan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan terkoordinasi. Dalam praktiknya, komitmen terhadap keterbukaan dan pertanggungjawaban diwujudkan melalui penyusunan serta publikasi rutin laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan dokumen kebijakan tata kelola perusahaan.

Namun demikian, penerapan GCG dalam perusahaan besar tidak terlepas dari berbagai tantangan. Potensi permasalahan masih dapat muncul, khususnya terkait efektivitas fungsi pengawasan, independensi dalam penetapan kebijakan strategis, serta pemenuhan asas keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih mendalam terhadap bagaimana kelima prinsip GCG dijalankan dalam praktik operasional perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di PT Unilever Indonesia Tbk. melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Kajian dilakukan secara deskriptif menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan, laporan keberlanjutan, serta dokumen tata kelola perusahaan selama periode 2020–2024. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur akademik terkait GCG sekaligus memberikan masukan praktis bagi pelaku usaha dan regulator dalam upaya memperkuat tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Good Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dimaknai sebagai suatu rangkaian alat yang bertujuan untuk memandu dan mengawasi operasional perusahaan. agar tercipta keseimbangan antara kekuasaan pengelolaan yang dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan usaha dan kewajiban pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Konsep ini mencakup pengaturan hubungan dan pembagian peran antara pemilik, dewan direksi, pengelolaan, pemilik saham, serta pihak-pihak lainnya yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan. (Harinurdin & Safitri, 2022)

Penerapan GCG memberikan berbagai keuntungan penting bagi perusahaan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Implementasi GCG mampu menekan biaya agensi, yaitu pengeluaran yang timbul akibat pemberian kewenangan pengelolaan kepada manajemen, mencakup penggunaan

sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi serta biaya pengawasan terhadap perilaku manajer.

2. Manajemen yang baik membantu mengurangi biaya modal, yaitu pengeluaran yang harus ditanggung perusahaan saat mendapatkan dana dari pemberi pinjaman, karena praktik pengelolaan yang baik meningkatkan kepercayaan dari pihak penyedia dana.
3. Mekanisme GCG mendorong pengambilan keputusan yang lebih terstruktur dan logis sehingga meningkatkan efisiensi dalam operasional serta menciptakan budaya kerja yang lebih profesional, yang pada gilirannya memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja perusahaan.
4. Penerapan GCG dapat mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan oleh direksi dalam pengelolaan perusahaan, sehingga potensi kerugian bagi perusahaan maupun pihak terkait dapat diminimalkan.
5. Kepercayaan investor terhadap perusahaan akan meningkat seiring dengan kualitas tata kelola yang baik, yang pada gilirannya memperkuat nilai perusahaan dan mempermudah akses terhadap pendanaan untuk pengembangan usaha, khususnya dalam kegiatan ekspansi. (I. P. Sari, 2021)

Prinsip-Prinsip Dasar Good Corporate Governance

Suatu bisnis dapat dikatakan telah melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) jika mampu menunjukkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola dengan secara konsisten dan efisien. Menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023, terdapat lima pokok prinsip GCG, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.

1. *Transparency* (Transparansi)
Prinsip ini menekankan keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi material serta relevan, baik terkait kondisi keuangan maupun kebijakan strategis, dengan cara yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan hak mereka..
2. *Accountability* (Akuntabilitas)
Akuntabilitas berkaitan dengan Kejelasan tugas, pengaturan, dan cara pertanggungjawaban setiap bagian perusahaan agar pengelolaan dapat berlangsung dengan efisien. Prinsip ini menjamin adanya pemisahan kekuasaan yang jelas antara dewan komisaris, direksi, manajemen eksekutif, dan para pemegang saham.
3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)
Perusahaan wajib menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip Etika dalam dunia usaha, sekaligus menjalankan kewajiban terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud dedikasi kepada para pemegang saham dan semua pihak yang terlibat.
4. *Independency* (Kemandirian)
Kemandirian mengharuskan perusahaan dikelola dengan cara yang profesional tanpa adanya paksaan, campur tangan, atau bentrokan kepentingan dari pihak mana pun yang dapat memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan.
5. *Fairness* (Kewajaran)
Prinsip kewajaran menuntut adanya perlakuan yang setara dan adil terhadap seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. (Putri & Trisnaningsih, 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang difokuskan pada PT Unilever Indonesia Tbk sebagai entitas publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan tahun 2020 sampai 2024, laporan tentang keberlanjutan, dokumen resmi terkait tata kelola perusahaan, serta artikel ilmiah yang membahas pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia. Proses pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen dan peninjauan literatur, sementara analisis datanya dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yang menafsirkan dan mengaitkan praktik tata kelola perusahaan terhadap kerangka teoretis GCG untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai tingkat penerapan prinsip-prinsip GCG di PT Unilever Indonesia Tbk.

HASIL PEMBAHASAN

PT Unilever Indonesia Tbk merupakan perusahaan terbuka yang bergerak di sektor barang konsumsi dengan portofolio merek yang luas, antara lain Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Rinso, dan Indomie. Perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta menjadi bagian dari jaringan global Unilever Group, sehingga memiliki tingkat kompleksitas tata kelola yang baik. Struktur tata kelola perusahaan dibentuk untuk mengatur hubungan antara pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui fungsi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Sistem ini didukung oleh berbagai kebijakan yang meliputi manajemen aset, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap hukum, pengembangan SDM, serta penguatan budaya perusahaan sebagai fondasi operasional yang berkelanjutan.

Penerapan Prinsip GCG di Unilever Indonesia

A. Transparansi

Unilever Indonesia menerapkan prinsip transparansi sebagai elemen dari pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) melalui berbagai langkah konkret yang memastikan informasi perusahaan dapat diakses secara jelas, akurat, dan tepat waktu oleh seluruh pemangku kepentingan.

1. Publikasi laporan resmi secara lengkap dan tepat waktu

Unilever Indonesia secara konsisten menerbitkan:

- a. Laporan Tahunan yang mencakup kinerja bisnis, strategi, pencapaian, dan tantangan Perusahaan
- b. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh auditor yang tidak memiliki hubungan dan disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku
- c. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang mengungkapkan pengaruh sosial, ekologis, dan keuangan dari kegiatan perusahaan.

Semua laporan ini dirilis secara berkala dan tepat waktu, memenuhi tanggung jawab untuk mengkomunikasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia, serta memastikan bahwa data yang diberikan adalah tepat, relevan, dan dapat diandalkan. diperbandingkan dari tahun ke tahun.

2. Penyediaan informasi yang mudah diakses

Perusahaan menyediakan akses informasi yang terbuka dan mudah melalui:

- a. Situs resmi Unilever Indonesia (www.unilever.co.id) dan situs investor relations (www.unilever.co.id/investor-relations), yang menyediakan dokumen laporan, presentasi, siaran pers, dan informasi terkini tentang perusahaan.
- b. Informasi yang terstruktur dan mudah dicari, seperti profil perusahaan, struktur organisasi, anggota Dewan Direksi dan Komisaris, kepemilikan saham, serta kebijakan korporasi.

- c. Pembaruan berkala terhadap informasi penting, sehingga investor, analis, media, dan publik dapat memperoleh data terkini secara langsung.
3. Pengungkapan kebijakan dan struktur perusahaan secara terbuka
Unilever Indonesia menerapkan transparansi dengan mengungkapkan secara jelas:
 - a. Kebijakan Pembayaran bagi Direksi dan Dewan Komisaris, mencakup susunan gaji, bonus, dan insentif, yang disampaikan dalam laporan tahunan dan dokumen RUPS.
 - b. Struktur kepemilikan saham, termasuk pemegang saham utama dan kepemilikan saham oleh anggota Direksi serta Dewan Pengawas beserta keluarga inti mereka.
 - c. Pengungkapan risiko bisnis utama, termasuk risiko pasar, regulasi, lingkungan, dan sosial, serta bagaimana perusahaan mengelolanya melalui sistem manajemen risiko dan pengendalian internal.

B. Akuntabilitas

Selain transparansi, PT Unilever Indonesia Tbk juga menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai komponen vital dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), prinsip akuntabilitas diterapkan melalui penentuannya terhadap fungsi, struktur, kewenangan, dan tanggung jawab setiap elemen perusahaan. Hal ini memungkinkan pengelolaan badan usaha dilakukan dengan cara yang efektif, terukur, dan dengan akuntabilitas kepada para pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya.

1. Penegasan Struktur dan Fungsi Organ Perusahaan

Unilever Indonesia menerapkan struktur tata kelola yang terperinci dan jelas, mencakup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi. RUPS berfungsi sebagai organ tertinggi dengan kewenangan strategis, termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta Dewan Direksi. Dewan Komisaris memiliki tugas untuk mengawasi kebijakan manajemen perusahaan dan kinerja Dewan Direksi, sedangkan Dewan Direksi diamanatkan untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan visi, misi, dan strategi yang telah ditentukan. Pembagian tugas dan wewenang ini diatur dengan resmi dalam anggaran dasar serta pedoman tata kelola perusahaan.

2. Implementasi Sistem Pemantauan dan Pengendalian Internal

Sebagai wujud akuntabilitas, Unilever Indonesia menerapkan sistem pengendalian internal yang menyeluruh untuk memastikan setiap kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan kebijakan serta peraturan yang berlaku. Perusahaan telah membentuk komite di bawah Dewan Komisaris, seperti Komite Audit, yang bertugas memantau proses laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi. Komite Audit secara rutin melakukan evaluasi dan mengajukan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai bagian dari mekanisme pengawasan. bagian dari mekanisme pengawasan yang akuntabel.

3. Pertanggungjawaban kinerja Direksi dan manajemen

Unilever Indonesia menetapkan indikator kinerja yang jelas bagi Direksi dan manajemen sebagai dasar evaluasi kinerja perusahaan. Pertanggungjawaban

kinerja ini disampaikan kepada pemegang saham melalui laporan tahunan dan forum RUPS, yang mencakup pencapaian kinerja keuangan, operasional, serta realisasi strategi perusahaan. Dengan adanya mekanisme evaluasi dan pelaporan kinerja yang terstruktur, perusahaan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan manajerial dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

4. Pertanggungjawaban kinerja Direksi dan manajemen

Unilever Indonesia menetapkan indikator kinerja yang jelas bagi Direksi dan manajemen sebagai dasar evaluasi kinerja perusahaan. Pertanggungjawaban kinerja ini disampaikan kepada pemegang saham melalui laporan tahunan dan forum RUPS, yang mencakup pencapaian kinerja keuangan, operasional, serta realisasi strategi perusahaan. Dengan adanya mekanisme evaluasi dan pelaporan kinerja yang terstruktur, perusahaan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan manajerial dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

5. Audit independen sebagai bentuk akuntabilitas keuangan

Dalam rangka menjamin keandalan laporan keuangan, Unilever Indonesia menggunakan jasa auditor independen yang terdaftar dan berizin untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Temuan dari audit tersebut diumumkan secara transparan dalam laporan tahunan serta laporan keuangan perusahaan. Tindakan ini menunjukkan dedikasi perusahaan terhadap tanggung jawab keuangan dan meningkatkan keyakinan pemegang saham serta pihak terkait mengenai keandalan data keuangan yang disajikan.

C. Pengaruh Mekanisme GCG terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka

Kualitas pelaporan keuangan merupakan indikator penting keberhasilan penerapan GCG pada perusahaan terbuka. Laporan keuangan yang andal dan transparan meningkatkan keyakinan investor mengenai performa dan masa depan perusahaan. Sistem pengelolaan seperti efisiensi Dewan Komisaris, peran Komite Audit, dan komposisi kepemilikan oleh manajer dan institusional berperan dalam memperkuat sistem pengawasan dan menekan potensi manipulasi akuntansi. Kondisi ini relevan bagi Unilever Indonesia mengingat reputasi perusahaan di pasar modal sangat dipengaruhi oleh kredibilitas Informasi keuangan yang diberikan kepada masyarakat. (Syafii, 2025).

D. Strategi Implementasi GCG di Perusahaan Publik Indonesia

Keberhasilan penerapan GCG tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada strategi implementasi yang bersifat menyeluruh. Strategi tersebut mencakup partisipasi aktif pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, serta penguatan budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai etika dan profesionalisme. Bagi perusahaan dengan skala besar dan eksposur global seperti Unilever Indonesia, strategi ini menjadi krusial untuk menjaga konsistensi praktik tata kelola di tengah kompleksitas operasional dan tuntutan pasar internasional. (Immanuel & Oktaviani, 2024)

E. Mekanisme GCG terhadap Nilai Perusahaan Sektor Barang Baku

Hubungan antara penerapan GCG dan nilai perusahaan juga menjadi pertimbangan penting dalam konteks pasar modal. Struktur Dewan Komisaris independen, kepemilikan institusional, komposisi Direksi, serta keberadaan Komite Audit secara simultan berpengaruh terhadap persepsi pasar terhadap nilai perusahaan, khususnya pada sektor barang baku. Meskipun tidak seluruh variabel menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial, temuan simultan tersebut menegaskan bahwa Tata kelola perusahaan masih memainkan fungsi penting dalam menciptakan nilai bagi Perusahaan di mata investor (P. P. Sari & Pratiwi, 2023)

F. Determinan Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Peran GCG sebagai Variabel Moderator

Pendekatan lain dalam melihat peran GCG adalah dengan menempatkannya sebagai variabel moderasi antara faktor internal perusahaan dan kinerja keuangan. Pada sektor tekstil dan garmen di Indonesia, GCG terbukti tidak hanya memengaruhi secara langsung kinerja, tetapi juga memperkuat hubungan antara struktur modal, Ukuran badan usaha, serta rasio perputaran aset, memberikan kontribusi yang besar terhadap profitabilitas. Temuan ini menegaskan bahwa praktik tata kelola yang efektif dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan, sehingga menghasilkan kinerja keuangan yang optimal. (Kinerja et al., 2025).

Secara komprehensif, implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) berfungsi sebagai komponen penting dalam membangun mekanisme pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di perusahaan publik. Dalam konteks Indonesia, keharusan untuk praktik Tata kelola yang baik semakin penting sejalan dengan bertambahnya kompleksitas dalam operasi bisnis dan tuntutan untuk mendapatkan transparansi informasi di pasar saham. Laporan keuangan tak hanya berperan sebagai alat administratif, melainkan juga sebagai cara utama untuk berkomunikasi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan. Dengan menerapkan GCG, manajemen diarahkan untuk bertindak etis, menjauhi praktik yang manipulatif, serta menjaga kepercayaan publik terhadap keaslian data keuangan perusahaan (Syafii, 2025).

KESIMPULAN

Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa PT Unilever Indonesia Tbk telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan cara yang terstruktur dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang ada. Prinsip transparansi terlihat dari adanya keterbukaan informasi melalui penyebaran laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan yang dapat dengan mudah diakses oleh publik dan tepat waktu. Sementara itu, prinsip akuntabilitas tercermin dari kejelasan fungsi dan peran antara RUPS, Dewan Komisaris, serta Direksi, ditambah dengan adanya sistem pengendalian internal dan audit independen yang berfungsi secara efisien. Prinsip pertanggungjawaban diekspresikan melalui kepatuhan pada peraturan yang berlaku serta pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan., serta mekanisme pelaporan kinerja manajemen kepada pemegang saham.

Di sisi lain, prinsip kemandirian dan kewajaran telah diterapkan melalui upaya menjaga objektivitas pengambilan keputusan serta pemberian perlakuan yang setara kepada seluruh pemangku kepentingan, meskipun kedua aspek tersebut masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, penerapan GCG berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan, penguatan reputasi perusahaan, serta peningkatan kepercayaan investor. Oleh karena itu, konsistensi dalam penerapan tata kelola yang baik perlu terus dipertahankan sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk menghadapi dinamika bisnis dan tuntutan pasar modal di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, A. R. (2024). Literature Review: Pengaruh Peran Audit Internal , Sistem Pengendalian Internal dan Audit Manajemen Terhadap Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(5), 2985–2992. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i5.3074>
- Harinurdin, E., & Safitri, K. A. (2022). Tata Kelola Perusahaan Tercatat Di Indonesia. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 10(1). <https://doi.org/10.7454/jvi.v10i1.1178>
- Ilyasa, R., & Nurkholis, N. (2023). The Implementation of Asean Corporate Governance Scorecard on the Consumer Goods Industry: The Case of PT Unilever Indonesia Tbk. and PT Indofood Sukses Makmur Tbk. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 7(3), 421–432. <https://doi.org/10.36555/jasa.v7i3.2210>
- Immanuel, F. T., & Oktaviani, N. L. (2024). Implementation Strategy Of Good Corporate Governance In Public Companies In Indonesia. *JURNAL RISET AKUNTANSI*, 2(3), 45–52.
- Kinerja, D., Perusahaan, K., Peran, D. A. N., Corporate, G., & Sebagai, G. (2025). Determinan kinerja keuangan perusahaan dan peran good corporate governance sebagai pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(2), 128–141.
- Klaudia, S., Parawiyati, P., & Harmono, H. (2022). Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 13(1), 14–26. <https://doi.org/10.33558/jrak.v12i2.3115>
- Putri, D. P. A., & Trisnaningih, S. (2023). Pentingnya Perusahaan Dalam Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance. *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(11), 3453–3458.
- Rahmadanti, Y., & Fathah, R. N. (2025). IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENGOPTIMALKAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES). *Assets : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 15(1), 103–120. <https://doi.org/10.24252/assets.v15i1.57454>
- Sari, I. P. (2021). Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, 4, 90–97.
- Sari, P. P., & Pratiwi, R. D. (2022). Good Corporate Governance Sebagai Pilar Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Merauke. *Jurnal Perspektif Akuntansi*, 5(1), 26–35. <https://doi.org/10.35724/maj.v5i1.5309>
- Sari, P. P., & Pratiwi, R. D. (2023). Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Barang Baku Di Indonesia Pendahuluan. *Jurnal Perspektif Akuntansi*, 6(1), 74–93.
- Syafii, M. (2025). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 8261–8268.
- Yusuf, A., Halidah, N., Mufidah, N. L., & Nisa, S. K. (2023). KAJIAN IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PENGELOLA ORGANISASI ZAKAT DI DOMPET DHUAFKA KALIMANATAN TENGAH. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 4(2), 149–157. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i2.7356>